

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Stakeholder*

2.1.1.1 Pengertian *Stakeholder*

Definisi menurut Freeman dan Mc Vea (2001) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori *stakeholder* adalah ide tentang bagaimana suatu bisnis benar-benar bekerja, untuk setiap bisnis yang akan sukses, harus menciptakan nilai bagi pelanggan, karyawan, masyarakat, dan pemilik modal (Sutedi, 2012:39).

Suharyani et al. (2019) menyatakan bahwa di dalam *stakeholder theory* perusahaan dituntut untuk tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan investor tetapi harus peduli terhadap karyawan, konsumen dan masyarakat karena perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar dari kepentingan manajemen serta pemilik modal. Dukungan dari para pemangku kepentingan tersebut sangat dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan usahanya dimana pada setiap industri yang berbeda, *stakeholdernya* juga akan berbeda. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki tuntutan terhadap perusahaan yang mana tuntutan tersebut akan menjadi tekanan bagi perusahaan agar dalam menjalankan kegiatan bisnis memperhatikan setiap dampak yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masing-masing stakeholder.

Penelitian Fernandez-Feijoo et al. (2014) menjelaskan hubungan antara stakeholder dan industri berdasarkan kemungkinan tekanan dari empat kelompok stakeholder yang terdiri dari pelanggan, karyawan, lingkungan dan investor. Dengan menggunakan perspektif kelembagaan dan teori-teori pemangku kepentingan, Fernandez-Feijoo et al. (2014) membedakan industri ke dalam empat kategori yang terdiri *Customer-Proximity Industry/CPI* (industri dekat pelanggan), *Employee-Oriented Industry/EOI* (industri berorientasi karyawan), *Environmentally Sensitive Industry/ESI* (industri sensitif lingkungan) dan *InvestorOriented Industry/IOI* (industri berorientasi pada investor).

Beberapa penelitian terdahulu yang juga mengategorikan tekanan stakeholder ke dalam empat kelompok tersebut yaitu Alfaiz dan Aryati (2019), Hamudiana & Achmad (2017), Rudyanto dan Siregar (2018), serta Suharyani et al. (2019). Penelitian Nilawati et al. (2018) mengategorikan tekanan stakeholder ke dalam dua kelompok yaitu *Environmentally Sensitive Industry* dan *Investor-Oriented Industry*. Penelitian ini menggunakan variabel tekanan stakeholder berupa *Employee-Oriented Industry/EOI* sebagai indikator pengukurannya.

2.1.1.2 *Employee-Oriented Industry (EOI)*

a. Definisi dan Konsep *Employee-Oriented Industry (EOI)*

Employee-Oriented Industry (EOI) menunjukkan seberapa jauh sumber daya manusia (karyawan) yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi tekanan yang diterima perusahaan. Semakin baik hubungan perusahaan terhadap para karyawannya, maka semakin tinggi daya saing dan inovasi yang akan diciptakan. Adanya isu mengenai pembangunan berkelanjutan telah mendorong para

karyawan untuk memperhatikan perusahaan tempatnya bekerja. Karyawan-karyawan yang berkualitas akan mengerti pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan sehingga akan menuntut manajemen untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaan.

Saat ini, aset yang paling berharga dalam sebuah perusahaan bukan berupa aset yang dapat diukur, melainkan aset yang tidak dapat diukur seperti intellectual capital dan sumber daya manusia (Rudyanto dan Siregar, 2018). Memiliki karyawan yang berkualitas merupakan salah satu bentuk keuntungan bagi perusahaan, karena kinerja karyawan akan menentukan kinerja perusahaan.

Kegiatan operasional perusahaan dapat tergoncang ketika sumber daya manusia yang dimiliki tidak berkualitas. Oleh karena itu untuk menghindari kehilangan karyawan yang berkualitas perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial karena tingkat transparansi perusahaan juga menjadi salah satu pertimbangan karyawan yang berkualitas dalam memilih tempat bekerja.

b. Pengukuran *Employee-Oriented Industry* (EOI)

Employee-Oriented Industry/EOI (industri berorientasi karyawan) dalam penelitian Fernandez-Feijoo et al. (2014) diukur dengan menggunakan ukuran perusahaan karena semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin tinggi tekanan dari karyawannya. Jika termasuk dalam perusahaan besar atau multinasional maka akan diberikan nilai 1, sedangkan untuk perusahaan kecil dan menengah diberi nilai 0. Berbeda dengan Fernandez-Feijoo et al. (2014), penelitian yang dilakukan oleh Rudyanto dan Siregar (2018), Alfaiz dan Aryati (2019) serta Suharyani et al. (2019) mengukur *Employee-Oriented Industry* dengan menggunakan logaritma natural dari jumlah karyawan.

2.1.2 Karakteristik Perusahaan

Menurut Kamus Besar Indonesia, karakteristik adalah ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada perusahaan menandai sebuah perusahaan dan melekatnya dengan perusahaan lain (Adila dan Syofyan, 2016).

Safitri (2008) mengatakan Karakteristik perusahaan merupakan cirri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya jenis usaha atau industry, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan. Tuwemu dan Murni (2016) menjelaskan bahwa karakteristik perusahaan bisa dilihat diantaranya dari ukuran perusahaan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Dimana kinerja keuangan dapat dicerminkan melalui analisis rasio-rasio keuangan suatu perusahaan. Perhitungan rasio keuangan yang sering digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan antara lain: profitabilitas, likuiditas, laverage dan aktivitas perusahaan. Karena perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi untuk menginformasikan kepada stakeholder-nya.

Didalam penelitian ini jenis pengukuran untuk karakteristik perusahaan memakai dua indikator yaitu dengan memakai ukuran perusahaan dan tingkat rasio profitabilitas.

2.1.2.1 Ukuran Perusahaan

2.1.2.1.1 Pengertian Perusahaan

Menurut Swastha dan Sukotjo (2002:12) pengertian perusahaan adalah: “...suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.”

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 pengertian perusahaan adalah: “... setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan / atau berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia.”

Sedangkan menurut Mollengraf yang diahlibahasakan oleh Abdulkadir Muhammad (2002: 7), pengertian perusahaan adalah: “... keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.”

Dapat disimpulkan bahwa pengertian perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan dan dilakukan secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang.

2.1.2.1.2 Jenis-jenis Perusahaan

Suikirno (2011:190) menjelaskan bahwa organisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi kedalam tiga bentuk organisasi yang pokok, yaitu:

1. Perusahaan perseorangan

Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh satu orang sehingga pemiliknya memiliki kebebasan yang tidak terbatas. Ia sepenuhnya menguasai perusahaan dan dapat melakukan apapun tindakan yang dianggapnya untuk menguntungkan usahanya.

2. Firma

Firma merupakan organisasi yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka sepakat untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Modal perusahaan berasal dari para anggotanya, adakalanya mereka juga meminjam modal dari lembaga-lembaga lain.

3. Perseroan Terbatas

Perusahaan-perusahaan besar kebanyakan berbentuk perseroan terbatas. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal dengan mengeluarkan saham.

Ketiga bentuk organisasi atau perusahaan tersebut merupakan badan usaha swasta yang artinya didirikan oleh orang atau badan swasta. Bentuk organisasi atau perusahaan tersebut bergerak pada kegiatan usaha yang berbeda-beda, sehingga bentuk perusahaan itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kategori.

Menurut Hery (2016:2), ditinjau dari jenis usahanya (produk yang dijual), perusahaan dibedakan menjadi:

1. Perusahaan Manufaktur (Manufacturing Business).

Perusahaan jenis ini terlebih dahulu mengubah (merakit) input atau bahan mentah (raw material) menjadi output atau barang jadi (finished goods/final good), baru kemudian dijual kepada para pelanggan (distributor). Contoh perusahaan manufaktur, diantaranya adalah: perusahaan perakit mobil, komputer, perusahaan pembuat (pabrik) obat, tas, sepatu, pabrik penghasil keramik, dan sebagainya.

2. Perusahaan Dagang (Merchandising Business)

Perusahaan jenis ini menjual produk (barang jadi), akan tetapi perusahaan tidak membuat/menghasilkan sendiri produk yang akan dijualnya melainkan memperolehnya dari perusahaan lain. Contoh perusahaan dagang diantaranya adalah: Indomaret, AlfaMart, Carrefour, Gramedia, dan sebagainya.

3. Perusahaan jasa (service business)

Perusahaan jenis ini tidak menjual barang tetapi menjual jasa kepada pelanggan. Contoh perusahaan jasa diantaranya adalah: perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan transportasi (jasa angkut), pelayanan kesehatan (rumah sakit) dan sebagainya.

2.1.2.1.3 Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Machfoedz (1994) dalam Widaryanti (2009) ukuran perusahaan adalah:

“...suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lainlain). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total aset perusahaan.”

Menurut Butar dan Sudarsi (2012) pengertian ukuran perusahaan adalah: “... nilai yang menunjukkan besar/kecilnya perusahaan.”

Menurut Bambang Riyanto (2008:313) pengertian ukuran perusahaan adalah: “...Besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva.”

Menurut Kurniasih (2012:148) pengertian ukuran perusahaan adalah: “...nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan.”

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala untuk menunjukkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva.

2.1.2.1.4 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, klasifikasi ukuran perusahaan dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pengelompokan ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 pasal 6 adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

SK Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:

11/MIND/PER/2014 tentang program restrukturasi mesin dan/atau peralatan

industri kecil dan industri menengah mengelompokkan perusahaan dengan didasarkan pada nilai aset yang dimiliki perusahaan seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 1, yang menyatakan bahwa:

“Kriteria industri kecil dan industri menengah adalah: Industri kecil yaitu industri dengan nilai investasi paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan(b) Industri menengah yaitu industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), termasuk tanah dan bangunan tempat usaha”.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa industri besar yaitu industri dengan nilai investasi lebih besar dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

2.1.2.1.5 Metode Pengukuran

Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan Prasetyantoko (2008:257) mengemukakan bahwa: “Aset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar asset biasanya perusahaan tersebut semakin besar.”

Menurut Kurniasih (2012:148) ukuran perusahaan diukur melalui: “Ukuran Perusahaan = Ln Total Aktiva”

Menurut Jogiyanto Hartono (2013:282): “Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva”.

2.1.2.2 Profitabilitas

2.1.2.2.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Agus Sartono (2015:122) pengertian profitabilitas adalah: "...kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri."

Menurut I Made Sudana (2011:22) profitabilitas adalah: "...mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan".

Menurut Harahap (2015:304) profitabilitas adalah: "...menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah cabang, jumlah cabang, dan sebagainya"

Menurut Irham Fahmi (2011:135), profitabilitas adalah: "...rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi."

Sedangkan menurut Menurut Kasmir (2015:196) profitabilitas adalah: "...rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi."

Jadi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan laba dalam suatu periode tertentu, dengan mengukur total asset yang dimiliki, hasil penjualan maupun investasi.

2.1.2.2 Tujuan dan Mnfaat Rasio Profitabilitas

Perhitungan rasio profitabilitas memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan di perusahaan. Berikut ini beberapa tujuan dan manfaat menggunakan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2015:197), diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri;
7. dan tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah:

1. Besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. Mengetahui mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik Modal pinjaman maupun modal sendiri;

Selain itu, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan menurut Hery (2016:192) yaitu:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih”.

2.1.2.2.3 Metode Pengukuran Profitabilitas

Beberapa perhitungan Rasio Profitabilitas menurut Agus Sartono (2015:123) yaitu:

1. *Gross Profit Margin*

Gross profit margin merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan penjualan (sales). Menurut Agus Sartono (2015:123) “... gross profit margin sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan, apabila harga pokok penjualan meningkat maka gross profit margin akan turun begitupun sebaliknya”.

Gross profit margin dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Net Profit Margin*

Menurut Munawir (2010:89) yang dimaksud net profit margin adalah: “...mengukur tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya”.

Agus Sartono (2015:123) menyatakan bahwa “apabila gross profit margin selama satu periode mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya meningkat relatif lebih besar daripada peningkatan penjualan”.

Net Profit Margin dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan}}$$

3. *Return On Investment / Return On Aset*

Menurut Agus Sartono (2015:123) yang dimaksud *Returun On Investment / Returun On Asset* adalah: "...menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan".

Returun On Investment / Retrun On asset dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Return On Investment} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

4. *Return On Equity*

Menurut Agus Sartono (2012:124) yang dimaksud dengan ROE yaitu: "...mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan makin besar".

Sedangkan menurut Agus Harjito dan Martono (2014:61) ROE yaitu: "...untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjajdi hak pemilik modal sendiri".

Return On Equity (ROE) dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

5. *Earning Power*

Agus Sartono (2012:125) mengemukakan bahwa *earning power* adalah: “...tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan. Rasio ini juga menunjukkan pula tingkat efisiensi investasi yang nampak pada tingkat perputaran aktiva. Apabila perputaran aktiva meningkat dan net profit margin tetap maka *earning power* juga akan meningkat. Dua perusahaan mungkin akan mempunyai *earning power* yang sama meskipun perputaran aktiva dan *net profit margin* keduanya berbeda”.

Earning Power dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Earning Power} = \frac{\text{laba penjualan}}{\text{Total Aktiva}} \times \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{penjualan}}$$

2.1.3 *Corporate Governance*

2.1.3.1 *Pengertian Corporate Governance*

Menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), *corporate governance* merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Terdapat banyak definisi tentang CG yang pendefinisianya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Perusahaan/korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu (a) teori pemegang saham (*shareholding theory*), dan (b) teori stakeholder (*stakeholding theory*).

Tumbull Report (1999) dalam Effendi (2016:2) mendefinisikan *corporate governance*:

“Sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.”

Menurut World Bank dalam Nuryadi dan Tolib (2017), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah:

“Kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

Menurut Forum *Corporate Governance on Indonesia* (FCGI) Effendi (2016:3) yaitu:

“*Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.”

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, menyebutkan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Dari beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* adalah tata kelola perusahaan yang baik yang mengatur hubungan antara pemegang saham, para kreditor, pemerintah, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan perusahaan yang berlandaskan perundang-undang dan etika berusaha.

2.1.3.2 Prinsip *Corporate Governance*

Menurut Effendi (2016:20) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Responsibilitas (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independency*)
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Berikut uraian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang berlaku secara umum:

1. *Transparansi (Transparency)*
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
2. *Akuntabilitas (Accountability)*
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. *Responsibilitas (Responsibility)*
Perusahaan berpegang pada prinsip kehati-hatian, mematuhi peraturan perundang-undangan serta mematuhi peraturan perusahaan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. *Independensi (Independency)*
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing orang perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*
Melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran.

2.1.3.3 Tujuan *Corporate Governance*

Dengan menerapkan *Good Corporate Governance* menurut Indonesian institute for corporate governance (IICG, 2012:40), dapat diperoleh beberapa manfaat antara lain:

- “1. Minimalkan *agency cost*
2. Meminimalkan *cost of capital*
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan
4. Mengangkat nilai perusahaan”.

Uraian penjelasan manfaat Good Corporate Governance adalah sebagai berikut:

1. Meminimalkan *agency cost*
Selama ini pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Meminimalkan *cost of capital*
Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan peminjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan
Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.
4. Mengangkat nilai perusahaan
Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra suatu perusahaan kadang kala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 manfaat yang dipetik dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG adalah:

1. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi

operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan.

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigit (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*).
3. Khusus untuk BUMN yang telah *go public*, dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG dapat meningkatkan minat investor untuk membeli saham BUMN tersebut.

2.1.3.4 Tujuan *Corporate Governance*

Tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, apabila *good corporate governance* dalam kepemilikan dapat berjalan dengan baik maka dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan.

Terdapat lima tujuan dari penerapan *good corporate governance* pada BUMN menurut KEPMEN BUMN Per-01/MBU/2011 yaitu:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif,serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

2.1.3.5 Mekanisme *Corporate Governance*

Menurut Walsh dan schward (1990) dalam Machmuddah (2018) adalah:

“Mekanisme CG merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol, pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme GC diarahkan untuk menjamin dan

mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi.”

Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998) dalam Bintara (2018) adalah:

“Mekanisme GC dibagi menjadi dua, yaitu *internal mechanism* (mekanisme internal), seperti komposisi dewan direksi/komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif. Mekanisme yang kedua yaitu *external mechanism* (mekanisme eksternal), seperti pengendalian oleh pasar dan level *debt financing*.”

Menurut Puspitawati, Suryandari, dan Susandya (2019) mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Berupa *internal mechanism* seperti: komposisi dewan direksi/komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif serta komite audit.
2. *External mechanism* seperti pengendalian oleh pasar, level debt financing, dan auditor eksternal.

Sedangkan menurut Sutedi (2012:37) mekanisme eksternal dan internal

Good Corporate Governance meliputi:

- a. Mekanisme Eksternal Mekanisme eksternal dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan yang meliputi investor, akuntan publik, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas.
- b. Mekanisme Internal Mekanisme internal terdiri dari:
 1. Kepemilikan Manajerial.
 2. Kepemilikan Institusional.
 3. Dewan Komisaris.
 4. Komite audit.

2.1.3.5.1 Kepemilikan Manajerial

Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam Gunarto dan

Riswandari (2019), kepemilikan manajerial adalah:

“Para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajemen melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambil keputusan.”

Marcus, Kane dan Bodie (2018:8) menyatakan bahwa:

“Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah dirinya sendiri.”

Menurut Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2016:156) kepemilikan manajerial adalah: “Pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan kepemilikan manajerial adalah pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan

Menurut Marcus, Kane dan Bodie (2018:9) struktur kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{KepemilikanManajerial} = \frac{\text{JumlahSahamManajemen}}{\text{TotalSahamBeredar}} \times 100\%$$

Rumus diatas berfungsi mengetahui presentase kepemilikan manajerial dengan membandingkan antara jumlah saham manajemen dengan jumlah saham yang beredar. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No../POJK.04/2013 tentang Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Perusahaan Terbuka terkait hak karyawan perusahaan untuk memperoleh sampai sejumlah 10% dari saham yang ditawarkan.

2.1.3.5.2 Kepemilikan Intitutional

Marcus, Kane dan Bodie (2018:10) menyatakan bahwa:

“Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing. Kepemilikan institusional dapat mengurangi agency cost dengan cara mengaktifkan pengawasan melalui investor-investor institusional. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dengan keterlibatan institusional dalam kepemilikan saham.”

Menurut Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2016:156) kepemilikan institusional adalah: “Persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan.”

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas, maka sampai disini pemahaman penulis bahwa kepemilikan institutional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi atau organisasi dalam suatu perusahaan yang dinyatakan dalam prosentase. Kepemilikan institutional juga melakukan pengawasan dalam kinerja perusahaan guna menghindarkan perusahaan dari kesalahan yang menyebabkan kerugian.

Menurut Marcus, Kane dan Bodie (2018:11) struktur kepemilikan institusional dapat dihitung dengan rumus:

$$KepemilikanInstitusional = \frac{JumlahSahamInstitusional}{TotalSahamBeredar} \times 100\%$$

2.1.3.5.3 Dewan Komisaris

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) menjelaskan pengertian dewan komisaris sebagai berikut:

“Dewan Komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan

memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.”

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 pengertian dewan komisaris adalah sebagai berikut: “Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.”

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan keseluruhan anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan bertugas melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada direksi dalam menjalankan perusahaan.

Menurut Puspitowati & Mulya (2014) ukuran dewan komisaris dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}$$

Rumus diatas berfungsi untuk mengetahui jumlah anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 yang menjelaskan jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

2.1.3.5.4 Komite Audit

Menurut Puspitowati & Mulya (2014) komite audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal dan salah satu elemen kunci dalam struktur corporate governance yang membantu mengendalikan dan mengawasi manajemen.

Menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-29/PM/2014 pengertian komite audit adalah:

“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi untuk membantu dewan komisaris menjalankan tugas dalam penelitian laporan keuangan dan tanggung jawab pengawasan dalam perusahaan.”

Berdasarkan pengertian diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa komite audit merupakan orang yang bertugas membantu, mengendalikan dan mengawasi manajemen dalam menjalankan perusahaan.

Menurut Puspitowati & Mulya (2014) komite audit diukur dengan menggunakan rumus:

Komite Audit = Jumlah Anggota Komite Audit di perusahaan

Rumus diatas berfungsi untuk menjelaskan jumlah komite audit yang ada di perusahaan. Menurut Peratur Bapepam-LK N0.IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa Komite Audit minimal terdiri dari 3 orang, dengan rincian minimal 1 orang komisaris independen yang menempati posisi ketua komite audit dan minimal 2 orang pihak independen dari luar emiten. Karena dengan semakin besar ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan pada komite terhadap pihak manajemen.

2.1.3.5.5 Dewan Komisaris Independensi

Menurut Linata dan Sugiarto (2012:80) komisaris independen adalah sebagai berikut: “Komisaris independen adalah suatu badan yang dibentuk perusahaan dengan anggotanya yang berisikan dewan komisaris dari luar

perusahaan dan memiliki fungsi untuk menilai kinerja manajemen secara keseluruhan.”

Komisaris independen menurut Wulansari, Titisari & Nurlela (2020) adalah sebagai berikut:

“Komisaris Independen merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang berasal dari pihak luar perusahaan atau pihak independen yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Komisaris independen di dalam perusahaan tidak memihak pemegang saham maupun pemilik perusahaan atau investor.”

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) komisaris independen sebagai berikut:

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Berdasarkan pengertian diatas, sampai pada disini komisaris independensi merupakan anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, pemegang saham dan anggota dewan komisaris lainnya.

Variabel Dewan Komisaris Independen dihitung melalui rasio persentase komisaris independen dengan total anggota komisaris perusahaan yang didapat dari *annual report* emiten terkait. Perhitungan komisaris independen ini mengacu pada penelitian Nainggolan & Rohman (2015) serta Salbiah & Mukhibad (2018) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

2.1.4 *Sustainability Report*

2.1.4.1 Pengertian *Sustainability Report*

Menurut GRI (2013) *Sustainability Report* (laporan keberlanjutan) adalah Informasi yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tentang dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari. *Sustainability Report* juga menyajikan nilai-nilai organisasi dan model tata kelola, dan menunjukkan hubungan antara strategi dan komitmennya untuk ekonomi global yang berkelanjutan.

Menurut Suharyani, dkk (2019) *Sustainability report* atau laporan keberlanjutan merupakan praktik pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. *Sustainability report* merupakan sumbangasih perusahaan kepada masyarakat yang dilihat dari tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang menggambarkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat mengenai aspek-aspek yang dilaporkannya dan sekaligus menjembatani kebutuhan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka pengambilan keputusan.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa *Sustainability Report* adalah laporan berkelanjutan yang merupakan praktik pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.4.2 Manfaat *Sustainability Report*

Manfaat *Sustainability Report* berdasarkan GRI dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat internal untuk perusahaan dan organisasi:

- a. Peningkatan pemahaman risiko dan peluang
- b. Menekankan hubungan antara kinerja keuangan dan non keuangan
- c. Mempengaruhi strategi, kebijakan, dan rencana bisnis Management dalam jangka panjang
- d. Merampingkan proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi.
- e. Sebagai benchmark dalam menilai kinerja keberlanjutan dengan memperhatikan hukum, norma-norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela.
- f. Menghindari kesalahan dalam mempublikasikan informasi mengenai lingkungan, sosial, dan tata kelola.
- g. Membandingkan kinerja internal antar organisasi dan sector.

2. Manfaat eksternal:

- a. Mengurangi atau mengembalikan dampak lingkungan, sosial dan tata kelola yang buruk
- b. Meningkatkan reputasi dan loyalitas merek
- c. Memungkinkan stakeholder untuk memahami nilai organisasi yang sebenarnya dalam bentuk aset berwujud dan tidak berwujud
- d. Menunjukkan bagaimana organisasi berpengaruh dan dipengaruhi oleh harapan tentang pembangunan keberlanjutan.

Pedoman yang digunakan untuk menyusun Sustainability Report dibuat oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) yang bermarkasi di belanda. GRI merupakan lembaga non profit yang menjadi pelopor pedoman laporan berkelanjutan atau laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR Report). GRI telah membuat pedoman laporan berkelanjutan pertama kali pada tahun 2000 yang disebut Generasi Pertama (G1) *Guidelines*. Lalu mengalami beberapa kali revisi, yaitu tahun 2002 menjadi Generasi Kedu (G2) *Guidelines*. Sejak tahun 2006 pedoman yang digunakan untuk menyusun Sustainability Report adalah generasi ketiga (G3) *Guidelines* dan kemudian bertransisi menjadi G3.1 *Guidelines*. Namun pada Mei 2013, diluncurkan Generasi Keempat (G4) *Guidelines*. Peluncuran tersebut merupakan kulminasi konsultasi ekstensif dengan para pemangku kepentingan serta dialog dengan ratusan pakar diseluruh dunia, dari berbagai sektor, termasuk perusahaan, masyarakat sipil, organisasi buruh,

akademisi dan lembaga keuangan. Tujuan G4 adalah sederhana: untuk membantu pelapor menyusun laporan keberlanjutan yang bermakna dan membuat pelaporan keberlanjutan yang mantap dan terarah menjadi praktik standar (GRI, 2013).

2.1.4.3 Prinsip *Sustainability Report*

Sustainability Report disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan GRI. Prinsip pelaporan berperan penting untuk mencapai transparansi pelaporan keberlanjutan dan oleh karenanya harus diterapkan oleh semua organisasi ketika menyusun laporan keberlanjutan.

Prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi dua kelompok prinsip-prinsip untuk menentukan konten laporan dan prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan. Prinsip-prinsip untuk menentukan konten laporan menjelaskan proses yang harus diterapkan untuk mengidentifikasi apa konten yang harus dibahas dengan mempertimbangkan aktivitas, dampak, dan harapan, serta kepentingan yang substantif dari para pemangku kepentingannya. Prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan memberikan arahan berupa pilihan-pilihan untuk memastikan kualitas informasi dalam laporan keberlanjutan, termasuk penyajian yang tepat. Kualitas informasi adalah hal yang penting untuk memungkinkan para pemangku kepentingan dalam membuat asesmen kinerja yang masuk akal serta mengambil tindakan yang tepat (GRI, 2013).

Prinsip – prinsip untuk menentukan konten *Sustainability Report* (GRI.13) tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Pelibatan Pemangku Kepentingan**
Organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana organisasi telah menanggapi harapan dan kepentingan wajar dari mereka.

2. Konteks Keberlanjutan
Laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Informasi mengenai kinerja harus disertakan sesuai konteks. Pertanyaan yang mendasari pelaporan keberlanjutan adalah bagaimana sebuah organisasi berkontribusi dimasa mendatang terhadap peningkatan atau penurunan konsidi, pengembangan, dan tren ekonomi, lingkungan serta sosial ditingkat lokal, regional atau global.
3. Materialitas
Laporan harus mencakup aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi atau secara substansial mempengaruhi assesmen dan keputusan pemangku kepentingan.
4. Kelengkapan
Laporan harus berisi cakupan aspek material dan boundary, cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang signifikan serta untuk memungkinkan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja organisasi dalam periode pelaporan.

Prinsip – prinsip untuk menentukan kualitas *Sustainability Report*

(GRI,2013) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keseimbangan
Laporan harus mencerminkan aspek – aspek positif dan negative dari kinerja organisasi untuk memungkinkan dilakukannya assesmen yang beralasa atas kinerja organisasi secara keseluruhan.
2. Komparabilitas
Organisasi harus memilih, mengumpulkan, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang memungkinkan para pemangku kepentingan menganalisa perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dan yang dapat mendukung analisis relatif terhadap organisasi lain.
3. Akurasi
Informasi yang dilaporkan harus cukup sesuai akurat dan terperinci bagi para pemangku kepentingan untuk dapat menilai kinerja organisasi.
4. Ketepatan Waktu
Organisasi harus membuat laporan dengan jadwal yang teratur sehingga informai tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat.
5. Kejelasan
Organisasi harus membuat informasi tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan.
6. Keandalan
Organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganallisi, dan mengungkapkan informasi serta proses yang digunakan untuk menyiapkan laporan agar dapat diuji, dan hal itu akan menentukan kualitas serta materialitas informasi.

2.1.4.4 Pengukuran Kualitas *Sustainability Report*

Kualitas *sustainability report* dalam penelitian ini diukur dengan standar GRI-standards yaitu standar terbaru atas kelengkapan laporan keberlanjutan yang dipublish oleh perusahaan, semakin lengkap informasi yang diungkapkan oleh perusahaan menjadikan laporan keberlanjutan dinilai lebih berkualitas.

Suatu pengungkapan dikatakan berkualitas apabila *stakeholder* telah dapat menerima manfaat dari pengungkapan tersebut, serta suatu laporan dapat dikatakan berkualitas apabila dapat memudahkan para pemangku kepentingan dalam memahami laporan *sustainability report* yang nantinya untuk pengambilan keputusan jangka panjang yang berkelanjutan (Suharyani, dkk 2019).

Pengungkapan *Sustainability Report* didefinisikan sebagai laporan yang diungkapkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan yang meliputi tema *ekonomik, environmental, human rights, labor practices & decent work, society dan product responsibility* (GRI-G3 Guideliness).

Perhitungan SRDI dilakukan dengan memberikan skor 1 jika satu item diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan. Setelah dilakukan pemberian skor pada seluruh item, skor tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan SRDI adalah sebagai berikut (GRI:2013):

$$SRDI = \frac{n}{k}$$

Keterangan :

SRDI = Sustainability Report Disclosure Index

n = total item yang diungkapkan

k = total item yang seharusnya diungkapkan

Tabel 2.1

Indikator Pengungkapan Sustainability Report Disclosure (SDR)

Berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI)

Indikator Berdasarkan Aspek		
Kategori : Ekonomi		
Kinerja Ekonomi		
EC	1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
EC	2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
EC	3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
EC	4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
Keberadaan di Pasar		
EC	5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
EC	6	Perbandingan Management senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan
Dampak Ekonomi Tidak Langsung		
EC	7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
EC	8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Praktik Pengadaan		
EC	9	Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan
Kategori : LINGKUNGAN		
BAHAN		
EN	1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
EN	2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
Energi		
EN	3	Konsumsi energi dalam organisasi
EN	4	Konsumsi energi di luar organisasi
EN	5	Intensitas energy
EN	6	Pengurangan konsumsi energy
EN	7	Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa
Air		
EN	8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
EN	9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh

		pengambilan air
EN	10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
Keanekaragaman Hayati		
EN	11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
EN	12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
EN	13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
EN	14	Jumlah total spesies dalam IUCN Red List dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko Kepunahan
Emisi		
EN	15	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) langsung
EN	16	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) energi tidak langsung
EN	17	Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tidak langsung lainnya
EN	18	Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
EN	19	Pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
EN	20	Emisi Bahan Perusak Ozon (BPO)
EN	21	NO _x , SO _x , dan emisi udara signifikan lainnya
Efluen dan Limbah		
EN	22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
EN	23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
EN	24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
EN	25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
EN	26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan dan limpasan dari organisasi
Produk dan Jasa		
EN	27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
EN	28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
Kepatuhan		
EN	29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
Transportasi		
EN	30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan

		barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja
Lain-lain		
EN	31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Asesmen Pemasok atas Lingkungan		
EN	32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
EN	33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan		
EN	34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
Kategori : SOSIAL		
PRAKTIK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		
Kepegawaian		
LA	1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
LA	2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
LA	3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
Hubungan Industrial		
LA	4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
LA	5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal Management-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
LA	6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
LA	7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
LA	8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Pelatihan dan Pendidikan		
LA	9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan
LA	10	Program untuk Management keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
LA	11	Persentase karyawan yang menerima reuiu kinerja dan

		pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
Keberagaman dan Kesetaraan Peluang		
LA	12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
Kesetaraan Remunerasi dan Laki-laki		
LA	13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Asesmen Pemasok terkait Praktik Ketenagakerjaan		
LA	14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
LA	15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan		
LA	16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
HAK ASASI MANUSIA		
Investasi		
HR	1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
HR	2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
Non-diskriminasi		
HR	3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil
Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama		
HR	4	Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
Pekerja Anak		
HR	5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
Pekerja Paksa atau Wajib Kerja		
HR	6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa

		atau wajib kerja
Praktik Pengamanan		
HR	7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
Hak Adat		
HR	8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
Asesmen		
HR	9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
Asesmen Pemasok dan Hak Asasi Manusia		
HR	10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
HR	11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia		
HR	12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
MASYARAKAT		
Masyarakat Lokal		
SO	1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
SO	2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat local
Anti-Korupsi		
SO	3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
SO	4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti- korupsi
SO	5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Kebijakan Politik		
SO	6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
Anti Persaingan		
SO	7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
Kepatuhan		
SO	8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non- moneter atas ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan
SO	9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat
SO	10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil

TANGGUNG JAWA ATAS PRODUK		
Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan		
PR	1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
PR	2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
Pelabelan Produk dan Jasa		
PR	3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
PR	4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
PR	5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
Komunikasi Pemasaran		
PR	6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
PR	7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
Privasi Pelanggan		
PR	8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan		
PR	9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas *Sustainability Report* yaitu:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel, Objek dan Periode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rini Suharyani, Ihyaul Ulum dan Ahmad Waluya Jati (2019)	Variabel Dependen: Kualitas <i>Sustainability Report</i> Variabel Independen: - Tekanan <i>Stakeholder Corporate Governance</i>	Pengaruh Tekanan <i>Stakeholder dan Corporate Governance</i> Terhadap kualitas <i>Sustainability Report</i>	Tekanan <i>Stakeholder dan Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap Kualitas <i>Sustainability Report</i>
2.	Ria Aniktia dan Muhammad Khafid (2015)	Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Variable Independen: - Dewan Komisaris - Komite Audit - Kepemilikan Manajerial - <i>Governance Committee</i> - Profitabilitas - Leverage	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Komite Audit, <i>Governance Committee</i>, dan leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>
3.	Rhisa Dwi Putri Wulanda (2017)	Variable Dependen: Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Variabel Independen: - Aktivitas Perusahaan - Ukuran Perusahaan - Komite Audit - Dewan Direksi	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Publikasi <i>Sustainability Report</i>	Aktivitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Publikasi <i>Sustainability Report</i> Komite Audit Tidak

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel, Objek dan Periode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
				Berpengaruh Terhadap Publikasi Sustainability Report
4	Muhammad Khafid dan Mulyaningsih (2015)	Variable Dependen: Publikasi Sustainability Report Variabel Independen: Profitabilitas, leverage, Ukuran perusahaan, dewan direksi, komite audit, dan governance committee	Kontribusi Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance terhadap Publikasi Sustainability Report	Profitabilitas, ukuran perusahaan dan governance committee berpengaruh positif terhadap publikasi sustainability report Leverage, dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap publikasi sustainability report
5	Belen Fernandez Feijoo, Silvia Romeo dan Silvia Ruiz (2014)	Variable Dependen: Transparency of Sustainability Report Variable Independen: Customer proximity industries, Employee-oriented industries, Environmentally sensitive industries, Investor-oriented industries	<i>Effect of Stakeholders' Pressure on Transparency of Sustainability Report within the GRI Framework</i>	Customer proximity industries, Employee-oriented industries, Environmentally sensitive industries, Investor-oriented industries berpengaruh positif terhadap Transparency of Sustainability Report
6	Dwita Aliniar dan Sri Wahyuni (2017)	Variable Dependen: Kualitas Pengungkapan Sustainability Report	Pengaruh Mekanisme Good Corporate (GCG) dan	Dewan Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Saham Terkonsentrasi,

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel, Objek dan Periode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		variabel Independen: - Dewan Direksi - Prporsi Komisaris - Komite Audit - Kepemilikan Saham Instutional - Kepemilikan Saham Terkonsentrasi	Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Ukuran Perusahaan tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Proporsi Komisaris, dan Kepemilikan Saham Instutional berpengaruh positif Terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>
7.	Leni Susanti dan Amanda Alvita (2019)	Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Varaibel Independen: - Profitabilitas - Likuiditas - <i>Leverage</i> - Aktivitas Perusahaan - Ukuran Perusahaan	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Profitabilitas berpengaruh terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Likuiditas, <i>Leverage</i>, aktivitas Perusahaan dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhdap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>
8.	Mega Putri Yustia Sari dan Marsono (2013)	Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Variabel Independen: - Profitabilitas	Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i>	Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i>, Aktivitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan,

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel, Objek dan Periode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas - <i>Leverage</i> - Aktivitas Perusahaan - Ukuran Perusahaan - Komite Audit - Dewan Direksi 	Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Komite Audit, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berpengaruh Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>.
9.	Handre Diono dan Tri J.W Prabowo (2017)	Variable Dependen: Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Variable Independen: <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan - Dewan Komisaris Independen - Dewan Komisaris Perempuan - Profitabilitas 	Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Dewan Komisaris Independen, Dewan Komisaris Perempuan, dan Profitabilitas berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>
10	Pujiastuti (2015)	Variable Dependen: Luas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Variable Independen: <i>Size</i> , Profitabilitas, Umur perusahaan, <i>Leverage</i> , ukuran Dewan Komisaris dan Kepemilikan Saham	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Good Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap Luas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> leverage berpengaruh negatif terhadap Luas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> umur listing dan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel, Objek dan Periode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
				kepemilikan saham tidak berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan Sustainability Report

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Tekanan *Stakeholder* terhadap Kualitas *Sustainability Report*

Dalam Suharyani, dkk (2019) *Stakeholder* merupakan bagian penting dari perusahaan, suatu perusahaan tidak dapat beroperasi tanpa adanya stakeholder. Kelangsungan hidup perusahaan sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan. Faktor-faktor yang diperkirakan bahwa suatu perusahaan melaporkan laporan keberlanjutannya yaitu akibat dari adanya tekanan dari stakeholder. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fernandez-Feijoo et al. (2012), Hamudiana dan Achmad (2017) dan Rudyanto dan Siregar (2018) diproksikan dengan empat indikator berdasarkan primary stakeholder yaitu *Industri Sensitif Lingkungan (Environmentally Sensitive Industry/ESI)*, *Industri Dekat Konsumen (Consumer-Proximity Industry/CPI)*, *Industri Berorientasi Investor (Investor-Oriented Industry/IOI)* dan *Industri Berorientasi Pekerja/Karyawan (Employee-Oriented Industry/EOI)*.

Fernandez-Feijoo et al. (2012) menyatakan bahwa industri berorientasi investor dan pekerja berpengaruh paling tinggi dan industri sensitif lingkungan berpengaruh paling rendah terhadap transparansi dan pengungkapan *sustainability*

report. Sejalan dengan hasil penelitian lainnya, bahwa industri berorientasi investor dan pekerja/karyawan berpengaruh paling tinggi terhadap transparansi *sustainability report*. Perusahaan dengan tekanan dari lingkungan yang tinggi mendorong perusahaan untuk melaporkan laporan keberlanjutannya secara lebih transparan. Tekanan dari karyawan yang tinggi membuat perusahaan menghasilkan laporan keberlanjutannya yang lebih transparan, semakin banyaknya jumlah pekerja/karyawan maka semakin banyak jumlah pekerja maka semakin tinggi pula tingkat transparansi yang mereka minta. Sama halnya dengan perusahaan yang memiliki tekanan investor tinggi akan menghasilkan tingkat transparansi laporan keberlanjutan yang tinggi pula karena mengindikasikan adanya tekanan dari pasar modal untuk menaikkan tingkat kepercayaan dari para investor dengan cara meningkatkan level transparansi pelaporan.

2.3.2 Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas *Sustainability Report*

Dalam Dipo, dkk (2019) mengatakan bahwa Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung untuk melakukan pengungkapan melalui *Sustainability report*, karena profitabilitas merupakan salah satu indikator kinerja yang harus diungkapkan dalam *sustainability report*. Menurut Nasir et al (2014), perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk menginformasikan kepada stakeholdernya, karena perusahaan mampu menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan dapat memenuhi harapan mereka terutama investor dan kreditor. Akibatnya, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung

untuk melakukan pengungkapan melalui sustainability report, karena profitabilitas merupakan salah satu indikator kinerja yang harus diungkapkan dalam sustainability report khususnya keberlangsungan produk mereka kepada konsumen. Penelitian yang dilakukan Andani, (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *sustainability report*.

Semakin besar suatu perusahaan akan semakin disorot oleh para *stakeholder*. Dalam kondisi demikian perusahaan membutuhkan upaya yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi *stakeholder* dalam rangka menciptakan keselarasan nilai-nilai sosial dari kegiatannya dengan norma perilaku yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu semakin besar perusahaan akan semakin berkepentingan untuk mengungkap informasi yang lebih luas. Pengungkapan yang luas ini dimaksudkan untuk, antara lain: mendidik dan menginformasikan para *stakeholder* tentang tujuan atau maksud organisasi untuk meningkatkan kinerjanya; mengubah persepsi organisasi, tanpa mengubah kinerja actual organisasi; mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari isu-isu penting ke isuisu lain yang berhubungan; atau mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi. Hal-hal tersebut dilakukan dalam rangka menyelaraskan aktivitas perusahaan dengan norma perilaku dalam sistem sosial masyarakat sebagai suatu wujud legitimasi perusahaan (Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Ghozali dan Chariri (2007)). Beberapa penelitian sebelumnya Dilling (2009) dan Suryono (2011) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Sustainability report*. Hal ini karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula informasi yang terkandung di dalamnya,

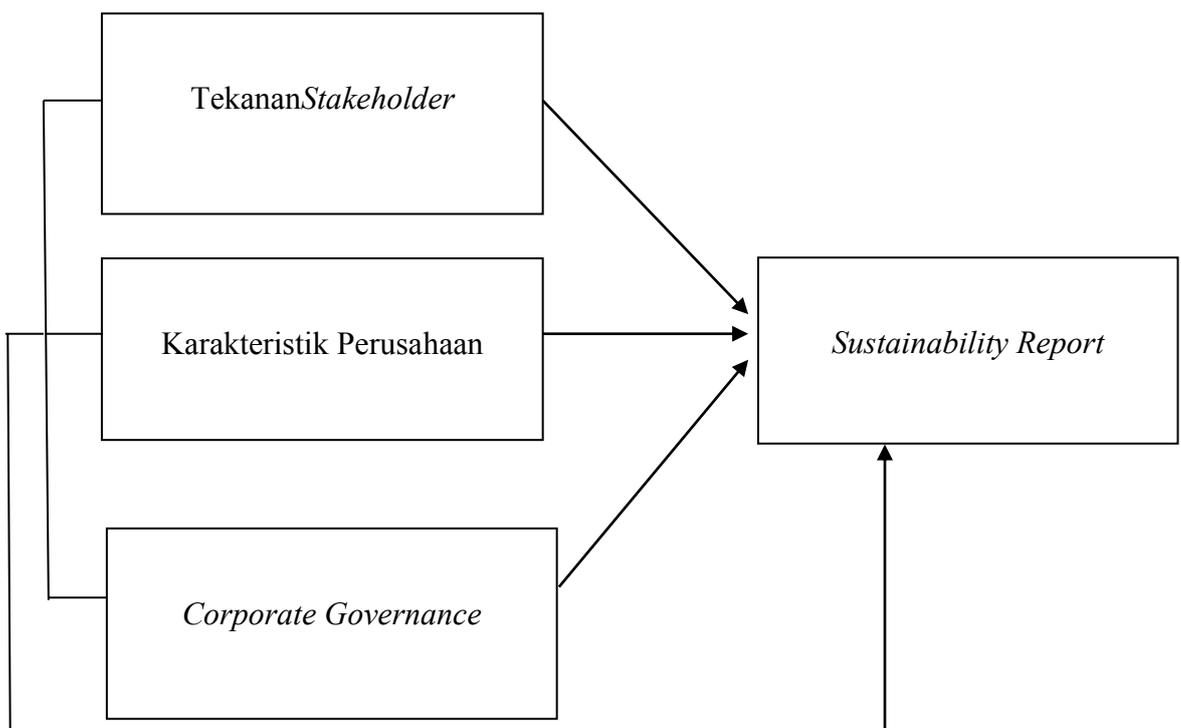
sehingga perusahaan terdorong untuk melakukan praktik pengungkapan *Sustainability report*.

2.3.3 Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kualitas *Sustainability Report*

Corporate governance adalah suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) demi tercapainya tujuan organisasi. *Corporate governance* merupakan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk menentukan kebijakan yang digunakan dalam meningkatkan keberhasilan usaha serta akuntabilitas perseroan sesuai dengan prinsip GCG.

Dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut dinilai telah berupaya menyampaikan seluruh informasi kepada para pemangku kepentingan termasuk laporan keberlanjutannya (*sustainability report*). Dalam penelitian ini *corporate governance* diproksikan dengan menggunakan jumlah rapat atau pertemuan dewan direksi, jumlah rapat atau pertemuan dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat atau pertemuan komite audit dan ada tidaknya kepemilikan saham manajerial yang diungkapkan. Dewan direksi dalam *corporate governance* merupakan organ yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan sedangkan dewan komisaris melakukan pengawasan yaitu memonitoring dan mengontrol manajemen operasional perusahaan serta memberi nasihat kepada Direksi. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan

terhadap kinerja Direksi dan Tim Manajemen sesuai dengan prinsip GCG. Kepemilikan saham manajerial dibentuk agar dapat mengurangi konflik antara manajemen dan pemilik, dengan adanya prinsip yang memberlakukan bahwa adanya kesetaraan antara manajer dan pemegang saham dilakukan agar manajemen ikut serta secara aktif dalam pengambilan keputusan sekaligus memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerjanya. Suharyani, dkk (2019).



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Kata Hipotesis berasal dari kata “hipo” yang artinya lemah dan “tesis” berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya.

Menurut Sugiyono (2018:63) bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut: “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Berdasarkan tinjauan pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan Tekanan *Stakeholder*, Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance* sebagai variabel independen serta Kualitas *Sustainability Report* sebagai variabel dependen. Berikut hipotesis sementara dari penelitian ini adalah:

- H1 : Terdapat Pengaruh Tekanan *Stakeholder* Terhadap *Sustainability Report*
- H2 : Terdapat Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap *Sustainability Report*
- H3 : Terdapat Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Sustainability Report*
- H4 : Terdapat Pengaruh Tekanan *Stakeholder*, Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance* Terhadap *Sustainability Report*